

Pilkades Serentak 2021 Kab. Tangerang Belum Bisa Dipastikan Waktunya

KABUPATEN TANGSERANG (IM)-Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 77 desa di 26 kecamatan Kabupaten Tangerang yang direncanakan berlangsung pada Maret 2021 masih belum bisa dipastikan.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPPMD) Kabupaten Tangerang hingga kini masih membahas peraturan bupati (perbup) tentang pilkades serentak. Munculnya aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat jadwal yang sudah dibuat harus diubah.

Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli mengaku belum bisa memastikan kapan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar. Tahapan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang berdasarkan aturan berlangsung pada Maret 2021. Kemudian, pada Juli 2021 seharusnya sudah dilaksanakan pelantikan kepala desa terpilih.

"Anggaran sudah disiapkan. Namun, jika instruksi dari Kementerian minta untuk diundur, apa boleh buat? Sampai saat ini kita masih menunggu instruksi diundur atau tidaknya," kata Mad Romli, kemarin.

Kabid Pemerintahan Desa (Pendes) pada DPPMD Kabupaten Tangerang, Syafrizal mengatakan Perbup tentang Pilkades Serentak Tahun 2021 sudah tinggal penetapan. Namun, seiring

berjalannya proses, terjadi banyak perubahan dan masih dalam pembahasan ulang.

"Ada perubahan di Perbup karena mengikuti aturan Kemendagri. Tentunya berpengaruh terhadap perubahan jadwal," ungkapnya.

Ia menjelaskan, selain masih adanya pertimbangan terkait potensi kerumunan saat pelaksanaan, baik pada masa kampanye maupun pada hari pencoblosan, juga terdapat perubahan jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini yang masih menjadi kajian Pendes yang akan dituangkan dalam Perbup Pilkades.

"Pertimbangannya, saat ini masih terjadi pandemi covid-19, sementara pelaksanaan pilkades akan menimbulkan kerumunan. Ini yang masih menjadi pertimbangan," tuturnya.

Selain itu, menurut Syafrizal, batasan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS juga berubah, dari sebelumnya masing-masing TPS sebanyak 2.000 pemilih, kini dibatasi hanya 500 pemilih dengan batas waktu pukul 7-12.00 WIB. Belum lagi soal pembentukan panitia Pilkades yang diwajibkan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

"Semula memang ditargetkan Maret sudah terlaksana. Tapi, karena banyak perubahan itu, maka dipastikan mundur. Karena proses tahapan pilkades dari pendaftaran hingga hari pencoblosan dan penghitungan suara minimal enam bulan," tutupnya. ● pp

10 Ribu Pedagang Pasar di Tangsel Segera Divaksin Covid-19

TANGSEL (IM)- Sebanyak 10 ribu pedagang yang beraktivitas di berbagai pasar tradisional maupun modern di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) segera mendapat suntikan vaksin Covid-19.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tangsel, Tulus Muladiyono, menerangkan, rencananya pada akhir Februari atau awal Maret 2021 vaksinasi bakal segera dilakukan terhadap seluruh pedagang pasar.

"Intinya kan kita nanti pedagang pasar akan dapat vaksinasi, yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Rencananya mungkin di sekitar akhir Februari atau Maret. Di tahap kedua, itu yang akan disasar," katanya, kemarin.

Menurut Tulus, jumlah pedagang pasar berdasarkan data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mencapai sekira 10 ribu pedagang. Meskipun angka itu bisa saja bertambah jika digabungkan dengan mereka yang berda-

gang di luar pasar. "Estimasi ada 10 ribuan dari Disperindag. Tapi kita minta update lagi. Karena misalnya dia tidak punya lapak, tidak punya kios, itu gimana? sedangkan dia di situ berjam-jam. Nah itu kan harus di data," jelasnya.

Menurut dia, pedagang pasar mendapat prioritas di pemberian vaksinasi tahap 2. Alasannya mereka memiliki interaksi cukup tinggi untuk kontak dengan orang lain. Sehingga demi mencegah penyebaran Covid, baik sesama pedagang ataupun dari pedagang ke pembeli, maka vaksinasi harus segera diberikan.

"Satu, interaksi mereka tinggi. Kemudian mereka juga menjadi penjual kebutuhan pokok. Itu jadi prioritas bahwa yang harus dilakukan. Terus pertemuan atau mobilisasi prioritas dari komunitas untuk bisa bertahan. Satu sisi juga dia membantu kita yang membutuhkan bahan pokok," ucapnya. ● pp

1.850 Butir Obat Tanpa Izin Edar Diamankan Sat Res Narkoba Polres Lebak



LEBAK (IM)- Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Lebak, Polda Banten berhasil mengamankan 1.850 butir obat tanpa izin edar dari tersangka EP, warga Kp. Binglu RT/RW 007/002, Kel/Ds. Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten. Lebak.

Kapolres Lebak, AKBP Ade Mulyana SIK melalui Kasat Resnarkoba, AKP Ilman Robiana SH membenarkan kejadian tersebut

Ya kami dari Sat Resnarkoba Polres Lebak telah berhasil mengamankan sebanyak 1.850 butir obat tanpa izin edar yang terdiri dari 746 butir obat-obatan jenis Tramadol HCl, 1104 butir obat-obatan warna kuning bertuliskan "mf" jenis Hexymer dan uang

tunai sebesar Rp 215.000, yang berada di dalam kamar tersangka EP, ujar AKP Ilman, Selasa (16/2).

Saat ini pelaku dalam pemeriksaan dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 196 jo pasal 197 UU No. 36 Th. 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)," tegas ilman

Kami terus mengimbau kepada orang tua yang mempunyai anak remaja agar lebih ketat lagi mengawasi anaknya. Apabila ada perubahan perilaku perlu diwaspadai akan adanya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, imbau AKP Ilman, ● nov



BIN Gelar Tes Usap Massal di Bojong Gede

Tes usap massal yang digelar warga di Terminal Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/2). Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar tes usap massal kepada warga di Terminal Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

DEBIT AIR DI SITU BESAR MENINGKAT TIGA KALI LIPAT

Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Kota Tangerang Tergenang

Akibat genangan air di sejumlah wilayah Kota Tangerang, arus lalu lintas pun harus dialihkan untuk menghindari kemacetan total.

TANGERANG (IM)

Hujan deras yang tak kunjung reda menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang, Banten, tergenang air dengan ketinggian antara 30-70 sentimeter, Selasa (16/2). Salah satu wilayah yang terendam, yaitu Jalan Boulevard Modernland, Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Seorag warga, Muhammad Iqbal, mengatakan, jalan raya di depan ruko Modern Walk itu tergenang air setinggi kurang lebih 60 sentimeter. "Hujannya emang deras sih dari pagi. Sempat reda sebentar, tapi jam 11.20 WIB tadi deras lagi. Dari tadi juga mati lampu di sini. Mulai tergenang sekitar jam 10.00 WIB," tutur Iqbal melalui sambungan telepon, Selasa siang.

Hingga saat ini, kata Iqbal, kawasan tersebut masih digenangi air. Menurut Iqbal, belum ada satu pun petugas yang mengatasi genangan tersebut.

Akibat genangan itu, Iqbal berujar bahwa beberapa kendaraan bermotor sempat mogok saat mencoba melewati jalan tersebut. "Ada beberapa mobil

atau motor gitu yang mogok. Mungkin totalnya lima kendaraan ya. Ada juga mobil sama motor yang berjalan pelan biar engga mogok," kata Iqbal. Kawasan lain yang tergenang air, yaitu Kompleks Kavling DPR Blok A, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh. Warga kompleks tersebut, Yasrizal, mengatakan bahwa genangan di kompleksnya setinggi 60-70 sentimeter. "Di kawasan sini, genangannya sampe masuk ke rumah warga. Tinggi genangannya antara 60-70 sentimeter," kata Yasrizal kepada awak media, Selasa siang.

BPBD Sebut Cuma Genangan

Banjir setinggi dengkul orang dewasa terjadi di Kavling DPR Blok A, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Air bahkan sudah masuk ke dalam rumah-rumah warga. Adin, salah seorang korban banjir mengatakan, air mulai masuk ke dalam rumah warga saat hujan deras Selasa pagi. Hingga saat ini, warga masih kebanjiran di dalam

rumah mereka. Sebagian keluar rumah dan berdiri terpaku.

"Bagaimana ini, setiap kali turun hujan terjadi banjir. Gudang dibangun tanpa drainase dibiarkan, warga yang jadi korban. Lihat, air sudah masuk rumah warga," kata Adin, Selasa (16/2).

Warga pun berharap, kawasan pegudangan yang berada di Kavling DPR, dapat dievaluasi kembali. Terutama saluran airnya yang banyak diabaikan. Sehingga, saat turun hujan lebat, pemukiman warga selalu kebanjiran.

"Kami sebagai warga biasa tidak biasa berbuat apa-apa lagi. Kami sudah sering teriak, sampai suara habis. Tetapi tidak juga ada tindakan dari pemerintah. Kami merasa dikorbankan demi gudang-gudang itu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Febi Darmawan mengatakan, tidak ada banjir. Meski warga teriak air masuk ke dalam rumah, dianggapnya bukan sebagai banjir dan genangan air lewat saja. "Masih belum ada laporan adanya banjir di Kota Tangerang. Kalau genangan bukan ke kita, tapi ke SDA," tukasnya.

Arus Lalin Dialihkan

Sejumlah titik di Kota Tangerang terendam air setelah hujan deras mengguyur wilayah ini

sejak pagi, Selasa (16/2). Sejumlah titik tergenang dengan perkiraan air setinggi 50 sentimeter, seperti kawasan GOR Tangerang dan Perumahan Modernland.

"Ya, kondisinya sekarang seperti ada wahana air," ujar Wawan, pengusaha di kawasan GOR Tangerang.

Menurut Wawan, air yang menggenangi ruas jalan mengakibatkan kendaraan terutama sepeda motor tidak dapat melintas.

"Sepeda motor banyak yang tumbang mesinnya," katanya.

Kepolisian pun melakukan rekayasa dengan pengalihan arus lalu lintas. "Rekayasa arus yang melintas depan GOR dialihkan lewat belakang GOR," ujar Kasat Lantans Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Jamal Alam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2).

Menurutnya, rekayasa lalu lintas tersebut diberlakukan selama genangan air surut. "Di Jalan Thamrin, anggota kami juga sudah di lokasi. Dan kendaraan masih dapat melintas, namun pelan," ungkapnya.

Adapun dampak genangan air di Jalan MH Thamrin, kendaraan yang melintas terjebak kemacetan mulai di depan Tangcity Mal menuju Serpong.

Meningkat Tiga Kali Lipat

Sementara itu, Debit air di Situ Besar Tangerang, Kota

Tangerang, Banten, meningkat hingga tiga kali lipat akibat intensitas hujan deras, Selasa (16/2).

Juru Situ Besar Tangerang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Sukandi mengatakan, ketinggian air di situ tersebut sempat menyentuh angka 182 sentimeter. Padahal, menurut Sukandi, normalnya debit air di situ tersebut berada di angka 50-60 sentimeter.

"Kalau kering banget, itu di antara 50-60 sentimeter. Tadi sempat nyentuh 182 sentimeter. Sekarang udah 180 sentimeter," kata Sukandi kepada awak media, Selasa siang.

Sukandi mengakui, peningkatan debit air itu terjadi karena intensitas hujan tinggi yang berlangsung selama beberapa jam di Kota Tangerang. Sehingga, sambung Sukandi, ia harus membuka seluruh pintu air yang ada di situ tersebut agar debit air lekas menurun.

"Seluruh pintu air di sini, empat pintu itu dibuka. Biar debit airnya menurun," ucapnya. Selain itu, lahan parkir yang berada tepat di sisi timur laut situ tersebut dapat tergenang air bila ketinggian air semakin meningkat. "Ini makanya empat pintu air dibuka, biar airnya kebuang ke aliran Sungai Cisadane," ungkap Sukandi. ● pp

Pemprov Banten Siapkan Insentif untuk Tim Satgas Covid-19

SERANG (IM)- Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk insentif tim terkait Covid-19 atau Satgas Penanganan Covid-19. Alokasi anggaran itu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Tambahan Penghasilan ASN.

"Sebagaimana diatur dalam Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021, pemerintah daerah boleh memberikan honor kepada anggota satgas," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten, Rina Dewiyanti dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2).

Poin 3 Surat Mendagri tentang Tambahan Penghasilan ASN menyebutkan pertama alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP) sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Kedua, alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dapat melebihi alokasi anggaran TPP tahun sebelumnya, sepanjang merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain, honorarium, uang lembur, dan/atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran 2020.

Poin berikutnya disebutkan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan tranbit linmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah.

Lebih lanjut Rina menjelaskan pihaknya juga telah melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pembentukan satgas yang mengacu pada SE tersebut punya fungsi lebih luas,

seperti penambahan tugas membantu pemulihan ekonomi, melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.130-Huk/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 Provinsi Banten.

SE yang ditandatangani Mendagri, Tito Karnavian itu disebutkan dalam rangka penanganan Covid-19 sebagai tindak lanjut peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta gubernur, bupati, dan wali kota membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur dan bupati/wali kota dalam hal ini langsung menjadi ketua atau tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

Tugas satgas di daerah meliputi pelaksanaan dan pengendalian implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, melakukan pengawasan, pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah. Komando dan kendali penanganan Covid-19 ada di bawah Kasatgas Penanganan Covid-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

SE Mendagri juga mengatur soal struktur satgas. Struktur di provinsi misalnya, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 ketua, 3 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 6 bidang, yaitu data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan disiplin, dan relawan. Sementara lampiran SE tersebut menyebutkan secara detail siapa yang menjadi ketua, wakil ketua, dan seterusnya. Untuk tingkat provinsi, gubernur menjadi ketua, TNI, kepolisian, dan unsur pemda masing-masing menjadi wakil ketua I-III. ● pra

Polda Banten dan Satpol PP Bagikan 15 Ribu Masker di Pasar Kalodran

SERANG (IM)- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, Kepolisian Daerah (Polda) Banten bersama instansi terkait dalam hal ini Satpol PP Provinsi Banten menggelar Operasi Yustisi, Selasa (16/2).

Dalam operasi yustisi kali ini, 38 personel yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa 2021 menyoroti pada keramaian masyarakat yaitu di Pasar Kalodran, Kabupaten Serang dan membagikan sebanyak 15.000 masker.

Kapolda Banten, Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto mengatakan bahwa pembagian masker tersebut sebagai bentuk komitmen Polda Banten dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polda Banten.

"Hari ini personel Polda Banten dan Satpol PP gelar Operasi Aman Nusa 2021, di mana dalam operasi Aman Nusa ini kita membagikan 15.000 masker kepada masyarakat yang sedang belanja dan pedagang di sekitar Pasar Kalodran maupun para pengendara yang melintas," ujar

Rudy Heriyanto.

"Dan kegiatan pembagian masker ini merupakan bentuk komitmen Polri khususnya Polda Banten dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19," lanjut Rudy Heriyanto.

Rudy Heriyanto menambahkan pembagian masker tersebut akan rutin dilakukan di wilayah hukum Polda Banten. "Pembagian masker ini akan rutin kita lakukan, mengingat saat ini kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sudah mulai berkurang. Untuk itu kita dari Polda Banten akan terus melakukan patroli protokol kesehatan guna mengedukasi masyarakat," tambah Rudy Heriyanto.

Masih kata Rudy Heriyanto, setiap hari pihaknya akan melaksanakan patroli kesehatan, dengan mendatangi tempat-tempat umum untuk mengedukasi masyarakat melalui pengeras suara dan pamflet-pamflet agar masyarakat dapat mendengar dan memahami betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan," ucap Rudy Heriyanto.

Terakhir, Rudy Heriyanto mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. "Saya mengajak kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Banten agar selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19 ini, dan ingat jangan menyepelekan virus ini. Dan mari bantu kami dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini dengan menerapkan 5M, yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan dengan sabun, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas," ajak Rudy Heriyanto.

Di tempat yang terpisah Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi berharap dengan kegiatan pembagian masker tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran Covid-19. "Saya berharap melalui kegiatan ini dapat mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polda Banten, dan saya juga sangat berharap agar masyarakat bisa lebih disiplin lagi dalam mematuhi protokol kesehatan," tutup Edy Sumardi. ● nov

